

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmaeny Azis dan Izlindawati, 2019, "*Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*", Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Sutiyoso, 2006, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik* ", Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I Made Pasek Diantha, 2017, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*", Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Moh. Mahfud MD., 2009, "*Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*", Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Mariyadi Faqih, 2010, "*Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*", Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Martitah, 2016, Mahkamah Konstitusi dari "*Negative Legislature ke Positive Legislature*", Cet.Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- Maruarar Siahaan, 2005, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Ni'matul Huda, 2018, "*Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*", Yogyakarta: FH UII Press.
- Rifa'i Abubakar, 2021, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: SUKA-Press.
- Safa'at M. A., *Et. Al.*, 2011, "*Hukum acara Mahkamah Konstitusi*", Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Thomas Gawron dan Ralf Rogowski, 2002, "*implementation of General Federal Constitutional Court decision: judicial orders and the federal legislature.*" *Constitutional Courts in Comparison.*", New York: Berghahn Books.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, "*Buku VI Kekuasaan Kehakiman*", Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Widodo, 2017, "*Metode Penelitian Populer Dan Praktis*", Jakarta: Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK2005

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

D. Jurnal

Akbar, Salsabilla dan Retno Saraswati, 2019, “Faktisitas Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Menambah Instrumen Hukum *Judicial order* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 8, Nomor 3.

Aprista Ristyawati, 2019, “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2.

Beni Kharisma Arrasuli, 2019, “Konstitusionalisme Bernegara Dan Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2.

Elsa Siada Rahma Sari, 2021, “Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobedience*) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

Fauziah dan Beni Kharisma Arrasuli, 2023, “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Self Executing* Dan *Non-Self Executing* Dalam Rentang Tahun 2016-2019”, Jurnal Swara Justitia, Volume 7, Nomor 2.

Intan Permata Putri Dan Mohammad Mahrus Ali, 2019, “Karakteristik Judicial order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4.

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy'ari, 2015, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 3.

Novendri M. Nggilu, 2019, “Menggagas Sanksi Atas Tindakan *Constitutional Disobedience* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1.

Proborini Hastuti, 2018, “Pemberian Kewenangan *Judicial order* Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar, Jurnal Supremasi Hukum”, Volume 7, Nomor 1.

Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, 2020, “*Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4.

E. Website

Aryo Wasisto Dan Achmadudin Rajab, 2023, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan”, artikel Researchgate.

Botha, Henk, 2018, “*Beyond Sexual Binaries? The German Federal Constitutional Court and the Rights of Intersex People*”, *South Africa: Stellenbosch University*, artikel diakses melalui [delivery.php](https://www.delivery.php) (ssrn.com).

Dinan, Jarron, “Definisi *Judicial Order*”, Pada Website *Judicial Order Definition* · Lsdata

Feri Amsari Dalam Ady Thea DA, 2022, “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Bentuk Pembangkangan Konstitusi?”, Artikel pada

Website Pembangkangan Konstitusi Bentuk Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi? Simak Penjelasannya (Hukumonline.Com)

Fitria Chusna Farisa, 2022, “Alasan Mahkamah Konstitusi Atur Masa Jeda 5 Tahun Buat Mantan Napi Jadi Caleg”, Artikel Melalui <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/11/30/18301831/Alasan-Mahkamah-Konstitusi-Atur-Masa-Jeda-5-Tahun-Buat-Mantan-Napi-Jadi-Caleg>.

Hidayat Salam, 2023, “Mahkamah Konstitusi Diminta Ingatkan KPU Terkait Aturan Caleg Bekas Napi”, Berita Kompas.Id Diakses Pada Mahkamah Konstitusi Diminta Ingatkan KPU Terkait Aturan Caleg Bekas Napi - Kompas.Id.

Khoirunnisa Nur Agustyati, 2023, “Membaca Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi 80/2022 Tentang Dapil”, Artikel Perludem, Diakses Pada Membaca Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi 80/2022 Tentang Dapil Oleh Khoirunnisa Nur Agustyati - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem.Org)

Maruarar Siahaan, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial Review* : Perlawanan Sebagai Pelanggaran Konstitusi”, Dari [Http://Www.Cic-Jure.Org/Implementasi-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Judicial-Review-Perlawanan-SebagaiPelanggaran-Konstitusi/](http://Www.Cic-Jure.Org/Implementasi-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Judicial-Review-Perlawanan-SebagaiPelanggaran-Konstitusi/).

Mohammad Mahrus Ali Dkk, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitutional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, dari website <https://MahkamahKonstitusiri.Id/Index.Php?Page=Download.Penelitian&Id=22>,

Mustakim, 2023, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Capres Dan Cawapres”, Diakses Pada Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Capres Dan Cawapres – Universitas Nasional (Unas.Ac.Id)

Putusan Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi RI.id.

Theodor C. Albert, Kathleen J. Campbell, “*Order Or Judgement, What Are These*”, pada website <https://Www.Cacb.Uscourts.Gov/Faq/Order-Or-Judgment-What-Are-These>.

Vitorio Mantalean Dan Sabrina Asril, 2023, “Jimly Anggap Surat Edaran KPU Sudah Cukup Tindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi”, Artikel Diakses Di Website Jimly Anggap Surat Edaran KPU Sudah Cukup Tindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Halaman All - Kompas.Com